

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) adalah organisasi perangkat Daerah yang berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga Kepala BPKKD harus melaksanakan tugas selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam melaksanakan berbagai fungsi-fungsinya tersebut, BPKKD harus mampu memberikan pembinaan serta pelayanan administrasi pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari APBD kepada seluruh SKPD termasuk penatausahaan seluruh kekayaan Daerah.

Pada tahun 2014, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Indikator-indikator keberhasilan dimaksud, antara lain adalah :

- a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI ;
- b. Terwujudnya sinergitas dengan instansi lain (Bank Jatim, BPK RI maupun BPKP) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih tertib, cepat, akurat, transparan dan akuntabel ;
- c. Realisasi target PAD sebesar 101.81% ;
- d. Pelunasan seluruh pinjaman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik penerusan pinjaman dari Asian Development Bank maupun pinjaman kepada Bank Jatim ;
- e. Persetujuan Rancangan APBD Tahun 2015 secara tepat waktu.

Keberhasilan-keberhasilan di atas bukanlah tujuan akhir dari pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, akan tetapi langkah-langkah kecil yang senantiasa harus di jaga guna mewujudkan tata kelola keuangan Daerah secara profesional, transparan, inovatif dan akuntabel menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai visi organisasi.

Sedangkan dari sisi belanja, secara keseluruhan penyerapan anggaran pada 2014 sebesar 78,90%. Terjadinya sisa anggaran tersebut selain dikarenakan penghematan belanja, di sisi lain juga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, misalnya belanja terkait

kerjasama dengan BPKP yang dikeluarkan sebesar riil kegiatan, penetapan Raperda APBD 2015 melewati batas serta appraisal (penilaian aset oleh ahli) yang belum dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Dengan mengacu pada pelaksanaan kinerja tahun 2014, maka sebagai upaya untuk terus meningkatkan keberhasilan-keberhasilan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan pada masa mendatang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah akan senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal guna menyesuaikan dinamika regulasi pengelolaan keuangan Daerah yang terus berkembang. Sedangkan secara eksternal, peningkatan kualitas koordinasi dan komunikasi dengan seluruh SKPD maupun dengan legislatif akan selalu dilaksanakan demi terwujudnya tata kelola keuangan Daerah secara profesional, transparan, inovatif dan akuntabel menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bojonegoro, Januari 2015

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH**

M. IBNU SOEYOETI, SE, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19641117 199301 1 003